

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SELAYAR

Jl. W. R. Supratman No. 4, Benteng, Kab. Kepulauan Selayar http://kejari-selayar.kejaksaan.go.id/

# KEPUTUSAN <u>KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SELAYAR</u> NOMOR: KEP- 014 /P.4.28/Cr.3/01/2024

#### **TENTANG**

# TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SELAYAR

#### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SELAYAR

#### Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dicapai tiga sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, serta peningkatan pelayanan publik;
- Bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana b. dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. Bahwa sebagai perwujudannya perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja Tahun 2024;

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2021 Nomor 298. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755:
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2016 tanggal 05 April 2016, tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-032/A/JA/8/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia;





- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-046/A/JA/12/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia; Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
- 8. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perja Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung RI;
- 9. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-515/C/08/2022 tanggal 08 Okober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia An. HENDRA SYARBAINI, SH. MH. NRP. 69871154 NIP. 19710215 199803 1 002 Jaksa Madya (IV/a) dalam jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar di Selayar;
- 10. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-021/A/J.A/03/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (AKIP) DI KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SELAYAR

**TAHUN ANGGÀRAN 2024.** 

KESATU : Para pejabat/pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri

Kepulauan Selayar Tahun 2024

KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum

PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar;

2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa

segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Benteng

Pada Tanggal : 03 Januari 2024

## KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SELAYAR



<u>HENDRA SYARBAINI, S.H.,M.H.</u> JAKSA MADYA NIP. 19710215 199803 1 002

#### Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- 3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- 4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- 5. Arsip.





LAMPIRAN : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : KEP- 014 /P.4.28/01/2024

TANGGAL : 03 Januari 2024

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	HENDRA SYARBAINI, SH., MH Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19710215 199803 1 002 Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar	KETUA
2.	RISNAENI, SH Madya Wira TU (III/c) NIP. 19870130 200604 2 002 Kepala Sub Bagian Pembinaan	SEKERTARIS
3.	LA ODE FARIADIN, SH Jaksa Muda (III/d) NIP. 19830519 200912 1 001 Kasi Intelijen	ANGGOTA
4.	IRMANSYAH ASFARI, SH, Jaksa Muda (III/d) NIP. 19851213 200812 1 002 Kasi Tindak Pidana Umum	ANGGOTA
5.	SYAKIR SYARIFUDDIN, SH. Jaksa Pratama (III/c) NIP. 19870330 201403 1 002 Kasi Tindak Pidana Khusus	ANGGOTA
6.	ASRUDDIN, SH, Jaksa Muda (III/d) NIP. 19820721 200604 1 004 Kasi Perdata Dan Tata Usaha Negara	ANGGOTA
7.	ADRI KURNIA YUDHA, SH Jaksa Pratama (III/c) 19860923 201403 1 002 Kasi Barang Bukti Dan Barang Rampasan	ANGGOTA
8.	MUHAMMAD RIZAL Yuana Wira TU (III/a) NIP. 19740802 199903 1 002 Kaur Keuangan	ANGGOTA
9.	NURUDIN AMRULLOH, ST Yuana Wira TU (III/a) NIP 19950124 202203 1 003 Analis Sistem Informasi	ANGGOTA

Ditetapkan di : Benteng Pada Tanggal : 03 Januari 2024

## KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SELAYAR,



HENDRA SYARBAINI, S.H., M.H. Jaksa Madya NIP. 19710215 199803 1 002



